Jurnal Mercatoria

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria>

Dikirim: 20 Agustus 2020; Diterima: 25 Desember 2020; Diterbitkan: 28 Desember 2020

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Returns of State Financial Losses in Implementing Corruption Criminal Law Enforcement

Aisyah^{1)*}, Immanuel Simanjuntak²⁾ & Masitah Pohan³⁾

1) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Indonesia

2) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Indonesia

3) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

*Corresponding Email: aisyahshmh@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana korupsi termasuk *extra ordinary crime*. Menurut UU nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk *extra ordinary crime*. Kerugian keuangan di Republik Indonesia karena tindak pidana korupsi tidak bisa menutupi terhadap gelisah, keresahan warga masyarakat yang cukup tinggi mengenai penegakan hukum pada tindak pidana korupsi di negara Republik Indonesia. Pengembalian kerugian keuangan Negara Republik Indonesia ialah sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh Negara Indonesia untuk mengembalikan kerugian keuangan negara atas kejahatan tindak pidana korupsi. Dimana kejahatan dengan menyembunyikan uang atau harta kekayaan tindak pidana korupsi dari pemerintah atau organisasi dengan cara memasukkan dana atau uang itu ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut terlihat seperti berasal dari kegiatan yang legal, sedangkan tindak pidana korupsi yaitu seseorang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar kewenangannya dan orang yang menerima pemberian juga termasuk tindak pidana. Upaya untuk memulihkan kekayaan hasil kejahatan atau tindak pidana korupsi terjadilah tindakan pemulangan keuangan atas kerugian negara sebagai tambahan pidana di putusan pengadilan pidana oleh hakim terhadap kekayaan yang dimiliki terpidana tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Penegakan Hukum, Pengembalian Keuangan Negara.

Abstract

Corruption includes *extra ordinary crime*. Based on Law nomor of 1999 in conjunction with Law nomor 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes. The loss of state finances due to criminal acts of corruption has not been covered up and public unrest is still high against law enforcement for criminal acts of corruption in Indonesia. Restitution of state financial losses is a system of law enforcement carried out by the state to restore state financial losses for criminal acts of corruption. Where is the crime by hiding money or assets of corruption from the government or organization by inserting the money into the financial system (*financial system*) so that the money looks like it comes from legal activities, whereas a bribery crime is someone who gives or promises something to other people to commit an act that violates their authority and the person who receives a bribe also includes a bribery crime which is stipulated in the law. Efforts to recover assets resulting from crime or corrupt acts take place in the recovery of state financial losses as an additional crime in a criminal court ruling by a judge of assets owned by convicted corruption.

Keywords: Corruption, Law Enforcement, Financial Returns Country.

How to Cite: Aisyah, Simanjuntak, I. & Pohan, M. (2020). Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Mercatoria*. 13 (2): 178-187.

PENDAHULUAN

Tindak Pidana korupsi pada UU No. 31 tahun 1999 diubah menjadi tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan No. 31 tahun tindak pidana korupsi dalam aturan UU No. 31 tahun 1999 diubah dengan perundang-undangan No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UUPTPK) tidak disebutkan pengertian dari korupsi secara tegas. Aturan di Pasal 2 ayat (1) bahwa: “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, akan dipidana dengan hukuman pidana di penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan hukuman paling lama dua puluh tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).”

Meningkatnya pelaku tindak pidana korupsi yang tidak bisa dikendalikan bisa membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, tapi juga kehidupan bernegara dan berbangsa juga. Negara Indonesia korupsi pada tingkat korupsi politik (Hartanti, 2012). Di Indonesia kondisinya sudah terserang pada kanker politik dan ekonomi sudah di

stadium akhir atau kritis. Kanker ganasnya korupsi semakin menggerogoti saraf vital dalam tubuh negara Republik Indonesia, maka terjadinya krisis institusional.

Perbuatan korupsi politik dilakukan orang atau institusi yang punya kekuasaan politik, atau yang berduit banyak si konglomerat yang berbuat melakukan hubungan transaksional kolektif kepada yang punya pemegang kekuasaan. Tindak pidana korupsi suatu perbuatan kejahatan memberikan untung bagi dirinya pribadi dengan menyalahgunakan jabatan dari pihak lain yang dimana perbuatan tidak dilakukan sendiri, namun biasanya melibatkan lebih dari satu orang, berbeda dengan tindak pidana pencucian uang dan suap.

Masing-masing telah memiliki karakteristiknya, kemudian tindak pidana pencucian uang dikenal dengan *money laundering* dimana kejahatan menyembunyikan uang kekayaan tindak pidana korupsi dari pemerintah atau organisasi dengan cara memasukan uang ke sistem keuangan sehingga uang tersebut terlihat seperti berasal dari kegiatan legal, sedangkan tindak pidana suap yaitu seseorang memberi, menjanjikan sesuatu kepada orang lain melakukan suatu perbuatan yang melanggar kewenangannya dan orang

yang menerima suapan juga termasuk tindak pidana suap yang dimana diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan arti korupsi di Pasal 2 ayat (1) UUPTPK diatas, ada beberapa unsur tindak pidana korupsi, tiga unsur adalah: secara melawan hukumnya adalah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang bisa merugikan negara/perekonomian negara; pasal 3 kemudian menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan karena menguntungkan pribadi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang sudah ada padanya karena adanya jabatan atau kedudukan yang merugikan perekonomian negara; dan memberi hadiah atau janji-janji kepada pegawai negeri dengan mengingat adanya kekuasaan yang melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan maka yang akan menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah perhitungan atas rugi keuangan negara dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, 2) Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam pengembalian kerugian keuangan negara?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dimana peneliti akan menggambarkan permasalahan aturan hukum berkaitan pengembalian keuangan negara yang dirugikan dalam pelaksanaan tegaknya penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan melihat dari segi yuridis (peraturan-peraturan atau norma-norma yang berlaku) yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris (praktek penegakan hukum yang terjadi di lapangan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan atas Rugi Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Faktor utama korupsi biasanya kemiskinan jadi akar dari masalah korupsi, hal ini terlihat ketidakseimbangan pendapatan dan pengeluaran konsumtif dari penyelenggara Negara. Namun paradigma tersebut tergeser disebabkan oleh perbuatan korupsinya itu sendiri yang arahnya kepada sektor swasta (konglomerat) dan birokrasi tinggi yang level kehidupannya telah gelimang harta. Perkembangan tindak pidana korupsi baik dilihat dari sisi kuantitas dewasa ini

bisa dikatakan korupsi di Negara Republik Indonesia bukan lagi kejahatan yang biasa (Jaya, 2008).

Penegakan aturan hukum tindak pidana korupsi dibutuhkan juga peran serta masyarakat selain peran dari aparat penegak hukum, ini menunjukkan dalam upaya penegakan hukum dibutuhkan peran serta semua pihak agar penegakan hukum berjalan dengan efektif. Hukum yang berkembang dan tumbuh dalam suatu wilayah tertentu merupakan hasil dari proses interaksi masyarakat.

Hukum yang dimaksud adalah aturan kehidupan masyarakat agar tercapainya kedamaian dan ketenteraman (Utari, 2012). Undang-undang No. 24 PRP Tahun 1960 dikeluarkan ketentuan mengenai pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Dalam Undang-undang No. 24 PRP Tahun 1960 perbuatan korupsi maka ada 2 hal dirumuskan yaitu:

- a. barang siapa dengan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dana atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; dalam pasal 2 dan 3 Undang-

undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat kata-kata, “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Unsur ini penting untuk menentukan dapat tidaknya pelaku korupsi dipidana. Secara normatif, jika semua unsur dalam pasal 2 dan 3 terbukti, maka pelaku dijatuhi pidana penjara maupun uang pengganti.

Sedangkan jika salah satu unsur tidak terbukti, maka berdampak pada bebasnya pelaku korupsi dari jeratan hukum (baik karena dihentikan penyidikan atau dibebaskan oleh hakim pengadilan). Perumusan delik (tindak pidana) dalam hukum pidana antara lain adalah delik formil dan delik materiil. Delik formil adalah delik yang rumusannya menekankan kepada perbuatan dilarang, dengan istilah lain pembentukan undang-undang melarang dilakukan perbuatan tertentu tanpa mensyaratkan terjadinya akibat apapun dari perbuatan tersebut.

Oleh karena itu, suatu delik formil dianggap telah selesai dilakukan apabila pelakunya telah menyelesaikan (rangkaiannya) perbuatan yang merumuskan dalam rumusan delik. Pada delik formil, akibat bukan merupakan suatu hal penting dan bukan

syarat selesainya delik. Kemudian untuk delik materiil adalah perumusannya menekankan akibat dilarang, dengan kata lain pembentuk undang-undang melarang terjadinya akibat tertentu.

Aturan dalam delik materiil, akibatnya ialah hal-hal yang harus ada. Selesai suatu delik materiil ialah jika akibat yang telah dilarang dalam rumusan delik sudah benar terjadi. Apabila pelaku telah selesai melakukan seluruh (rangkaian) perbuatan yang perlu untuk menimbulkan akibat yang dilarang akan tetapi karena suatu hal akibat dilarang tidak terjadi maka belum ada delik, paling jauh hanya percobaan terhadap delik.

Telah Dicantumkannya kata atau unsur “dapat” Pada pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka secara jelas bahwa pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan terjadinya/selesainya akibatnya merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Kata “dapat” tersebut berarti bahwa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tidak harus benar-benar telah terjadi, yang penting perbuatan pelaku memiliki peluang untuk menimbulkan akibatnya “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Penafsiran tersebut dikuatkan oleh penafsiran otentik pembentuk Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang

menyatakan “.....bahwa tindak pidana korupsi yaitu delik formil adalah ada suatu tindak pidana korupsi cukup dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang telah dirumuskan, bukan dengan ada timbulnya akibat”. Prof. Romli Atmasasmita. Pendapat beliau majelis hakim harusnya mengartikan unsur dapat merugikan keuangan negara ke dalam konteks delik formil.

Oleh sebab itu, kerugian negara secara fakta tidak diperlukan selama didukung dengan bukti yang arahnya ada potensi kerugian negara. Telah digunakannya undang-undang perbendaharaan negara, maka majelis hakim sudah hilangkan makna kata 'dapat' dalam unsur 'dapat merugikan keuangan negara'. pasalnya undang-undang perbendaharaan negara menganut konsep-konsep kerugian negara dalam arti delik materiil, kemudian pada aturan Undang-undang No. 31 tahun 1999 menganut konsep-konsep kerugian negara dalam arti delik formil yang ada pada aturan Undang-undang No. 31 Tahun 1999, dan bukan pada delik materiil (Hartanti, 2012).

Penguraian tulisan di atas, cenderung sependapat dengan para ahli yang menyatakan bahwa unsur-unsur “merugikan keuangan negara” itu diartikan dalam konteks delik formil yang ada pada aturan Undang-undang No. 31 tahun 1999, dan bukan pada delik materiil seperti dianut undang-undang perbendaharaan negara. Maka tindak pidana

korupsi dalam hal ini cukup memenuhi unsur perbuatan yang dirumuskan dan bukan dengan timbulnya suatu akibat. Jadi, jika suatu perbuatan korupsinya sudah berpotensi menimbulkan suatu kerugian keuangan negara, maka hal itu dianggap akan menimbulkan pada keuangan negara yang dirugikan. Adapun langkah mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, berarti berbicara mengenai upaya penegakan hukum dalam upaya menanggulangi kejahatan korupsi khususnya kemampuan untuk pengembalian kerugian negara yang sudah dikorupsi. Oleh karena itu diperlukan upaya kompreherensif untuk menanggulangnya yaitu melakukan upaya pengembangan sistem hukum, karena pada dasarnya korupsi merupakan kejahatan sistemik berkaitan erat dengan kekuasaan. Undang-undang Tipikor khususnya pasal 2 dan 3 tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai siapa instansi atau pihak mana yang berwenang dalam menentukan penghitungan kerugian negara, dalam praktik terjadi pula hakim dan jaksa akan perhitungkan terhadap kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi.

Sistem penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu sistem penegakan substansi hukum (di bidang hukum pidana yang terdiri dari hukum pidana material, hukum pidana formal, dan hukum

pelaksana pidana). Sedangkan Jimly Asshiddiqie menyatakan, penegakan hukum ialah suatu proses dilakukannya suatu upaya untuk tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai perilaku dalam lalu lintas atau hubungannya hukum di dalam kehidupan yang bermasyarakat dan bernegara (Asshiddiqie, 2016).

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Penegakan aturan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi memiliki tata cara tersendiri sehingga dalam melakukan sebuah penegakan hukum terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi mestilah melalui beberapa tahapan agar terciptanya sebuah penegakan hukum yang bersih, adil, jujur dan memiliki kepastian hukum yang jelas.

Tahapan-tahapan tersebut menunjukan sebuah pola yang terdapat dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan kejaksaan sebagai instansi penegak hukum yang memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam sebuah fondasi atau dasar hukum yang kuat yang terencana dan sistematis.

Jaksa sebagai aparat penegakan hukum di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi selain sebagai penuntut umum jaksa juga memiliki wewenang dalam penyidikan seperti yang telah diatur pada aturan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia yang menjelaskan: pada bidang pidana, kemudian kejaksaan punya tugas dan wewenang, antara lain:

- a. Melakukan suatu penuntutan
- b. Melaksanakan dari apa yang ada penetapan hakim dan keputusan pengadilan yang sudah peroleh kekuatan hukum tetap.
- c. Melakukan suatu pengawasan kepada pelaksanaan putusan pidana bersyarat, kemudian putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Adanya melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang berdasarkan kepada undang-undang; penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dalam kerugian negara yang kecil setelah berlakunya SE Jampidsus yaitu lebih memfokuskan terhadap pengembalian kerugian negara yang kecil terhadap tindak pidana korupsi yang kecil oleh orang atau

pelaku tindak pidana korupsi tersebut.

Sedangkan pengembalian kerugian negara sendiri telah ada dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2004 mengenai Pembendaharaan Negara Pasal 59 yang menerangkan:

- 1) Tiap adanya kerugian negara atau daerah disebabkan karena tindakan melanggar hukum atau lalai seseorang maka harus segera diselesaikan dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Bendahara, pegawai negeri (PNS) bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung mengakibatkan merugikan keuangan negara, wajib ganti kerugian itu.
- 3) Tiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa di kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah yang ada bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun.

Berdasarkan dari ajaran sifat melawan hukum formil dan materil maka tindak pidana korupsi yang telah memenuhi unsur-unsur pasal tentang tindak pidana korupsi antara lain: Pasal 2 sampai Pasal 20 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sudah diganti dan ditambahkan dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka harus disidangkan di pengadilan untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) sehingga perbuatan terhadap melawan hukum dilakukan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, apabila telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 2 sampai Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999 yang sudah diubah kemudian ditambahkan dengan UU No. 20 Tahun 2001 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dapat alasan untuk diberhentikan penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh penegak hukum (Penyidik, penuntut umum dan hakim) sehingga walaupun hasil penghitungan kerugian negara yang disebabkan oleh orang atau pelaku tindak pidana korupsi sangat kecil tetap akan diproses sampai pengadilan karena berdasarkan ajarannya sifat melawan hukum formil dan materiil perbuatan tersebut tidak bisa hapus.

tindak pidana korupsi di Republik Indonesia sudah semakin meluas di kalangan masyarakat Indonesia.

Perkembangannya dewasa ini yaitu, baik dari kualitas kejahatannya maupun kuantitas kasus yang terjadi, terus menerus adanya peningkatan setiap tahun. Adanya peningkatan di tindak pidana korupsi bisa mengganggu dan dampaknya kepada segi kehidupan manusia bermasyarakat. Situasinya bisa menjadi sebab adanya kejahatan yang merusak moral bangsa Indonesia dikategori sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*).

Tindak pidana korupsi yang dikategorikan dalam hal kejahatan luar biasa perlu ditangani dengan penanganan yang khusus sehingga perlu aturan atau perundang-undangan khusus dalam aturan tindak pidana korupsi tersebut. "Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dilakukannya tanpa pandang bulu, artinya ketika terjadi suatu perkara kasus tindak pidana korupsi telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti serta unsur-unsur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka pelakunya bisa diproses ke tahap persidangan.

Jaksa menerapkan ataupun melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian

yang kecil tetap melanjutkan ke tahap proses persidangan karena menurut kriteria objektif, perbuatan dari pelaku telah memenuhi unsur yang ada tindak pidana korupsi sehingga tidak ada perbedaan dalam proses penegakan hukum walaupun kerugian yang ditimbulkan tersebut sangatlah kecil, secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang nilai kerugiannya kecil dan besar sama saja karena hukum yang berlaku umum yang menyamaratakan dan tidak memilih dalam penegakannya.

Sehingga besar atau kecil bukan menjadi alasan untuk menghentikan atau menghapus pidana yaitu terhadap pelaku tindak pidana korupsi, hal ini juga yang menyebabkan kebijakan Jaksa Agung Muda tindak pidana khusus tidak mempengaruhi dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang nilai kerugian yang kecil. Terkait dengan penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya, orang atau pelaku tindak pidana korupsi bagian dari masyarakat.

Aturan pasal 4 UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan: "Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak

menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan 3". Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami, SE Jampidsus yang dikeluarkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tidak mempengaruhi terhadap penegakan hukum dari tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara yang kecil, karena secara yuridis Pasal 4 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, memberikan sebuah penjelasan yang membuat aparat penegak hukum seperti Jaksa tetap melanjutkan proses peradilan terhadap perkara kasus tindak pidana korupsi yang kecil sekalipun.

Sehingga dalam hal ini banyak perkara kasus tindak pidana korupsi dengan kerugian yang kecil seperti yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kotabumi tetap dilanjutkan walaupun kalau Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah mengeluarkan kebijakan yang berisi agar para Jaksa mengesampingkan tindak pidana korupsi bernilai kerugian yang kecil. Penolakan jaksa untuk menerapkan SE Jampidsus terhadap tindak pidana korupsi dengan adanya kerugian yang kecil, berdasarkan alasan yang telah dikemukakan sebelumnya seperti: untuk menjaga tatanan sosial, surat edaran tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan surat edaran

tersebut juga bertentangan pada aturan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga apa yang telah dilakukan jaksa dengan menolak menerapkan SE Jampidsus telah benar dan tidak bertentangan dengan hukum.

SIMPULAN

Pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, diperlukan upaya yang kompreherensif untuk menanggulangnya yaitu melakukan upaya pengembangan sistem hukum, karena pada dasarnya korupsi merupakan kejahatan sistemik berhubungan erat adanya kekuasaan. UU Tipikor khususnya di Pasal 2 dan Pasal 3 tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai siapa instansi atau pihak mana berwenang menentukan penghitungan kerugian negara, dalam praktik hakim dan jaksa memperhitungkan kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi.

Penegakan aturan yang berlaku adalah hukum terhadap tindak pidana korupsi dibutuhkan juga peran serta masyarakat selain peran dari aparat penegak hukum, ini menunjukkan dalam upaya penegakan hukum dibutuhkan peran serta semua pihak agar penegakan hukum berjalan dengan efektif. Hukum yang berkembang dan tumbuh dalam

suatu wilayah tertentu merupakan hasil dari proses interaksi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2016, Januari 11). *Penegakan Hukum*. Retrieved from www.jimly.com
- Hartanti, E. (2012). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jaya, N. S. (2008). *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*. Magister Ilmu Hukum, Semarang, Indonesia.
- Utari, I. S. (2012). *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang no 7 tahun 2006 tentang Ratifikasi KAK 2003 atau UNCAC 2003.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi no 31 tahun 1999 jo undang-undang no 20 tahun 2001.